

LAMPIRAN 3.**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**

Nomor : P.60/Menhut-II/2006

Tanggal : 25 September 2006

Contoh: Format Pernyataan Tanggung Jawab atau Statatement of Resposibility (SOR).

1. SOR pada UAPA sebelum Audit BPK-RI.**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI KEHUTANAN**

Laporan Keuangan Departemen Kehutanan *unaudited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran <angka tahun anggaran> sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,, <tanggal bulan tahun>
MENTERI KEHUTANAN,

<Nama pejabat>

2. SOR pada UAPA setelah Audit BPK-RI.**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI KEHUTANAN**

Laporan Keuangan Departemen Kehutanan *audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran <angka tahun anggaran> sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,, <tanggal bulan tahun>
MENTERI KEHUTANAN,

<Nama pejabat>

3. SOR pada UAPPA-E1 sebelum Audit BPK-RI.

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
SEKRETARIS JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL /
DIREKTUR JENDERAL / KEPALA BADAN**

Laporan Keuangan (sebutkan nama Unit Eselon I) *unaudit* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran <*angka tahun anggaran*> sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Jakarta,, <tanggal bulan tahun>
SEKRETARIS JENDERAL/
INSPEKTUR JENDERAL /DIREKTUR
JENDERALKEPALA BADAN/,*

<Nama pejabat>

4. SOR pada UAPPA-E1 setelah Audit BPK-RI.

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
SEKRETARIS JENDERAL/ INSPEKTUR JENDERAL /
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN**

Laporan Keuangan (sebutkan nama Unit Eselon I) *audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran <*angka tahun anggaran*> sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Jakarta,, <tanggal bulan tahun>
SEKRETARIS JENDERAL/
INSPEKTUR JENDERAL / DIREKTUR
JENDERALKEPALA BADAN/,*

<Nama pejabat>

5. SOR pada UAPPA-W.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR UPT PROVINSI....

Laporan Keuangan (*sebutkan UAPPA-W*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran *<angka tahun anggaran>* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Tempat, <tanggal bulan tahun>
Kepala Kantor.....
Selaku Koordinator UPT Wilayah.....,*

<Nama pejabat>

6. SOR pada UAKPA.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA KANTOR

Laporan Keuangan (*sebutkan Nama Kantor*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran *<angka tahun anggaran>* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Tempat,, <tanggal bulan tahun>
Kepala Kantor.....*

<Nama pejabat>

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ttd,

SUPARNO, SH.
NIP. 080068472

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd,

H. M.S. KABAN, S.E., M.Si.